

Vol. 1. No. 2. Desember 2016

p-ISSN: 2527-9313 e-ISSN: 2548-9747

ETNOSIA

JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA

**'Ini kan Bukan Bali': Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran
di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan**
Anwar

**Mana' dan Eanan:
Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan, dan Kontribusi Ritual
di Masyarakat Toraja**
Nurul Ilmi Idrus

Menulis Kajian Literatur
Amri Marzali

**'Bisnis Oriflame, Bisnis Konsultan Itu Sendiri':
Budaya Organisasi Multilevel Marketing untuk Mewujudkan Mimpi**
Deby Susan Kamawo

**Fast Food:
Gaya Hidup dan Promosi Makanan Siap Saji**
Citra Rosalyn Anwar

**Hablumminannas:
Nilai-Nilai Keislaman dan Praktiknya Dalam Pergaulan Antar
Ikhwan dan Akhwat pada Organisasi Forum Lingkar Pena Makassar**
Andi Batar Al Isra

**Review Buku
'Membaca' dan 'Dibaca' Secara Polyglot:
Gender, Seksualitas dan Perkawinan di Masyarakat Bugis**
Alwy Rahman



**Penerbit:
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

ETNOSIA

Jurnal Etnografi Indonesia

Terbit 2 kali dalam Setahun: Juni dan Desember

DEWAN PENASEHAT:

Dekan FISIP UNHAS

Ketua Departemen Antropologi FISIP UNHAS

Pimpinan Redaksi

Nurul Ilmi Idrus

Sekretaris

Muhammad Neil

Redaksi Pelaksana

Yahya Kadir, Tasrifin Tahara, Pawennari Hijjang

Administrasi dan Keuangan

Nurhadelia FL

Manager Tata Laksana

Ahmad Ismail

Distribusi dan Sirkulasi

Safriadi, Icha Musywirah Hamka, Batara Al Isra

Pembantu Teknis

Muhammad Kamil, Usman Idris, Muhammad Yunus

Dewan Redaksi

Kathryn M. Robinson (The Australian National University)

Tony Rudyansjah (Universitas Indonesia)

Heddy Shri Ahimsa-Putra (Universitas Gadjah Mada)

Lono Simatupang (Universitas Gadjah Mada)

Semiarto Aji Purwanto (Universitas Indonesia)

Atta Irene Allorante (Universitas Hasanuddin)

Irwan M. Hidayana (Universitas Indonesia)

Rosita Yulimatuh (Oriflame, Makassar)

Pande Made Kutanegara (Universitas Gadjah Mada)

Munsi Lampe (Universitas Hasanuddin)

Mahmud Tang (Universitas Hasanuddin)

ALAMAT REDAKSI

Departemen Antropologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Gedung Perkantoran FISIP UNHAS. Lt. 2

Jln. Perintis Kemerdekaan, Km. 10 Tamalanrea Makassar

Email redaksi: jurnal.etnosia@gmail.com

DAFTAR ISI

ETNOSIA
Jurnal Etnografi Indonesia
Vol. 1. No.2 Desember 2016

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ‘Ini kan Bukan Bali’: Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan <i>Anwar</i> | <i>1 - 11</i> |
| <i>Mana’ dan Eanan:</i> Tongkonan, Harta <i>Tongkonan</i>, Harta Warisan, dan Kontribusi Ritual di Masyarakat Toraja <i>Nurul Ilmi Idrus</i> | <i>12-26</i> |
| Menulis Kajian Literatur <i>Amri Marzali</i> | <i>27-36</i> |
| ‘Bisnis Oriflame, Bisnis Konsultan Itu Sendiri’: Budaya Organisasi Multilevel Marketing untuk Mewujudkan Mimpi <i>Deby Susan Kamawo</i> | <i>37-53</i> |
| <i>Fast Food:</i> Gaya Hidup dan Promosi Makanan Siap Saji <i>Citra Rosalyn Anwar</i> | <i>54-65</i> |
| <i>Hablumminannas:</i> Nilai-Nilai Keislaman dan Praktiknya Dalam Pergaulan Antar <i>Ikhwan</i> dan <i>Akhwat</i> pada Organisasi Forum Lingkar Pena Makassar <i>Andi Batar Al Isra</i> | <i>66-78</i> |
| Review Buku: ‘Membaca’ dan ‘Dibaca’ Secara Polyglot: Gender, Seksualitas dan Perkawinan di Masyarakat Bugis <i>Alwy Rahman</i> | <i>79-80</i> |

**‘Ini Kan Bukan Bali’:
Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran
di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan**

Anwar

Mahasiswa Program Pascasarjana Antropologi, Universitas Gadjja Mada.

achmad.anwar1012@gmail.com

Abstract

To become Balinese is to become Hindu with all set of Hinduism and its social norms. This article is focused on the most visible and significant changes in the everyday interaction of Balinese in the transmigration area of Kertoraharjo. As transmigrants, they generally understand that there are 4 categories of Balinese caste (Brahmana, Ksatria, Waisya, and Sudra) and these still exist in Kertoraharjo. However, residential area makes a difference, the practical realities of caste in Kertoraharjo has shown significant changes. Bali coarse language (Bahasa Bali Kasar) has become their daily language, and Bahasa Indonesia is an alternative and casteless language used in every day interaction. For ‘Sudra Kaya’, Balinese names are avoided to eliminate caste identity. The embodiment of caste is reproduced depending the arena and whether the interaction is horizontal or vertical. However, when it comes to rituals, the norms of caste is maintained as this is related to the transedental relations between human being and God, and any violation will result in karma. Any change in the embodiment of caste is legitimated in a phrase: ‘Ini kan bukan Bali’ (‘this is not Bali’).

Keywords: *Bali, caste, transmigrant, changes.*

Pendahuluan

Masyarakat Bali tersebar di Nusantara ini bukan tanpa alasan. Bukan seperti Minangkabau yang tersebar karena budaya merantau, bukan seperti Bajo yang tersebar karena budaya melautnya, bukan juga seperti Bugis yang terkenal diasporanya karena budaya perdagangan. Masyarakat Bali tersebar di Nusantara karena kondisi kepadatan penduduk di wilayah asli, yaitu Bali, sehingga pemerintah menjadikan Bali sebagai target kebijakan transmigrasi.

Masyarakat Bali adalah manusia etnis Bali, yang mendiami suatu wilayah tertentu (khususnya Bali) diantara etnik-etnik yang ada di Nusantara, yang memiliki kesadaran (*consciousness*) yang kuat tentang eksistensi kesatuan budaya Bali, bahasa Bali, dan Agama Hindu. Disamping itu manusia etnis Bali dianggap memiliki kesadaran yang kuat akan perjalanan sejarahnya serta memiliki ikatan-ikatan sosial dan solidaritas yang kuat yang berpusat pada *pura*, organisasi sosial, serta sistem komunal (Pitana 1994:48). Sebagian besar orang Bali menganut agama Hindu, karena menjadi Kristen

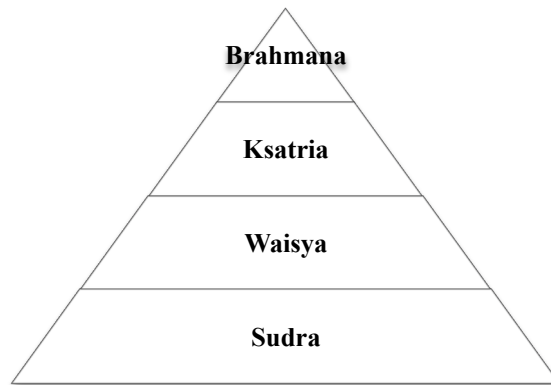
atau Muslim dalam pandangan orang Bali ibarat berhenti menjadi orang Bali (Geertz 1992:137).

Di Bali sendiri Bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya berdasarkan status sosial. Bahasa Bali terdiri atas Bali Alus, Bali Madya dan Bali Kasar (Tinggen 1986.). Bali Alus (bahasa Bali halus) dipergunakan untuk bertutur formal, seperti dalam pertemuan di tingkat desa adat, peminangan, atau bagi orang berkasta rendah terhadap orang berkasta lebih tinggi. Bali madya dipergunakan di tingkat masyarakat menengah, seperti pejabat dengan bawahannya. Sedangkan Bali Kasar dipergunakan bertutur oleh orang berkelas rendah, seperti kaum Sudra atau antara bangsawan terhadap abdi dalemnya (Bawa 2002:36-37).

Memindahkan penduduk terutama suku Bali bukanlah perkara mudah mengingat mereka adalah masyarakat yang sangat berkeyakinan kuat terhadap nilai dan norma Hinduisme, menjadi Bali identik dengan menjadi Hindu dan tinggal di Bali. Keluar dari Bali menurut masyarakat Bali dahulu adalah identik dengan meninggalkan Hindu. Dulu mereka yang keluar

dari Bali hanya mereka yang terusir karena sanksi adat atau karena masalah-masalah tertentu. Namun, kepadatan penduduk membuat transmigrasi menjadi alternatif domisili dan ke-Bali-an mengalami perubahan (Atmadja 2010).

Bagi orang Bali kasta adalah sebuah sistem yang erat kaitannya dengan Hinduisme dengan seluruh perangkatnya dan dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemberian Tuhan oleh penganutnya, dipandang sebagai sesuatu yang terwariskan, kaku/mengikat, serta sulit berubah. Sistem kasta membagi semua masyarakat Hindu kedalam kelompok-kelompok endogam dengan keanggotaan hereditas, yang serentak memisahkan dan menghubungkan seorang dengan yang lain melalui tiga karakteristik: pemisahan menyangkut perkawinan dan kontak; pembagian kerja dalam setiap kelompok yang mewakili satu profesi tertentu, dan mengurutkan kelompok-kelompok itu pada sebuah skala yang memilah mereka ke dalam kasta tinggi dan kasta rendah (Eriksen 1998:242). Sebagai kedudukan atau penggolongan masyarakat berdasarkan pada keturunan, kasta masyarakat Bali terbagi atas empat kasta yakni *Brahmana*, *Ksatria*, *Waisya*, dan *Sudra*. Jika kasta Brahmana berkaitan dengan kependetaan dan memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur kasta; kasta Ksatria merujuk pada mereka yang berprofesi sebagai abdi Negara atau kerajaan dan para keturunan raja; kasta Waisya identik dengan mereka yang bergelut di bidang perdagangan, usahawan/wiraswasta, dan peng-rajin; maka kasta Sudra adalah para buruh atau petani, tak bergelar dan merupakan kasta terendah (Karepun 2007:6), sebagaimana distrukturkan pada **Bagan 1** berikut ini:



Bagan 1. Struktur Kasta

Piramida ini menunjukkan kedudukan masing-masing kasta dimana Brahmana memiliki kedudukan teratas, diikuti oleh Ksatria, Waisya dan Sudra. Namun jika ditilik dari kuantitas, maka terjadi perbandingan yang terbalik, dimana kasta Sudra menempati tempat teratas dan kasta Brahmana berada pada peringkat terakhir.

Kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya diistilahkan sebagai Triwangsa, sementara kasta Sudra sebagai Sudrawangsa. Untuk mengidentifikasi masing-masing kasta, ini dapat dilihat dari nama atau gelar yang bersangkutan. Misalnya, Brahmana menggunakan gelar Ida Bagus (untuk laki-laki) dan Ida Ayu (untuk perempuan). Ksatria menggunakan gelar Anak Agung, Dewa Agung, Tjokorda, dan Dewa. Waisya menggunakan gelar I Gusti Agung, I Gusti Bagus (untuk laki-laki), I Gusti Ayu (untuk perempuan). Sementara Sudra tidak memiliki gelar, namun cara penamaan mereka menggunakan urutan kelahiran yaitu Wayan (pertama), Made (kedua), Nyoman (ketiga), dan Ketut (keempat), dan ini berulang pada anak-anak selanjutnya (Karepun 2007:50).

Dalam kitab suci *Veda*, istilah kasta tidak dikenal, melainkan *Warna*. Pada kitab *Bhagavad-gita* istilah yang digunakan adalah *Catur Warna*, yakni pembagian masyarakat menurut *Swadharma* (profesi) atau wilayah kerja masing-masing. Dalam kehidupan orang Bali terdapat sistem Wangsa, yaitu sistem kekeluargaan yang diatur menurut garis keturunan. Penggunaan istilah ini menjadi persoalan bagi masyarakat Bali ketika konsep Kasta digunakan dalam memahami konsep *Warna* pada masyarakat Hindu. Ini diper-

kenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa di zaman penjajahan. Nama-nama yang digunakan dalam Catur Warna (Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra), dialihfungsikan oleh kasta, termasuk gelar. Ironisnya, gelar tersebut diwariskan secara turuntemurun, tak peduli mereka menjalankan fungsi atau ajaran Catur Warna atau tidak (Kerepun 2007:12-16). Di Kertoraharjo, pemberian nama berdasarkan kasta masih dipraktikkan. Namun, mereka yang terlahir berkasta Sudra, tapi kaya ('Sudra Kaya') cenderung mengabaikannya agar identitas kastanya tidak nampak melalui nama (Bagus 1980).

Jika penelitian-penelitian sebelumnya terfokus pada masyarakat Bali di Bali, penelitian ini justru menitikberatkan pada masyarakat Bali di luar Pulau Bali. Diargumentasikan bahwa lokasi pemukiman membuat perbedaan dalam berinteraksi diantara orang Bali yang bertransmigrasi. Berbagai perubahan tersebut dilegitimasi karena mereka tidak sedang berdomisili di Bali dan diekspresikan dengan frasa 'Ini kan bukan Bali'.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut Kertoraharjo), yaitu perkampungan yang terbentuk sekitar 40 tahun yang lalu melalui program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lokasi ini kini telah berkembang dan menjadi desa yang makmur dan sejahtera, dan mayoritas penduduknya adalah orang Bali dan beragama Hindu.

Mereka yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang bervariasi berdasarkan umur, gender, kasta, dan pekerjaan, sebagaimana dijabarkan dalam **Tabel 1** berikut ini:

| No. | Nama | Umur | Gender (P/L) | Kasta | Pekerjaan |
|-----|--------|------|--------------|----------|------------------|
| 1. | Desak | 16 | P | Brahmana | Pelajar |
| 2. | Bagus | 68 | L | Brahmana | Pendeta |
| 3. | Ngurah | 34 | L | Weisya | Petani |
| 4. | Tirta | 62 | P | Weisya | Ibu Rumah Tangga |
| 5. | Iluh | 52 | P | Ksatria | Pedagang |
| 6. | Agung | 60 | L | Ksatria | Pengukir |
| 7. | Gusti | 67 | L | Ksatria | Pensiunan PNS |

| | | | | | |
|-----|--------|----|---|-------|----------------------|
| 8. | Wayan | 73 | L | Sudra | Petani |
| 9. | Kadek | 31 | P | Sudra | Guru/PNS |
| 10. | Merta | 43 | L | Sudra | Wiraswasta |
| 11. | Widana | 45 | L | Sudra | Pengurus Gapoktan |
| 12. | Made | 45 | L | Sudra | Pejabat Pemerintahan |
| 13. | Surya | 55 | L | Sudra | Tukang Bangunan |
| 14. | Kapal | 57 | L | Sudra | Wiraswasta |
| 15. | Arta | 65 | L | Sudra | Pensiunan PNS |

Wawancara dan observasi adalah kombinasi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan topik-topik wawancara meliputi pengetahuan tentang kasta, interaksi antar-kasta dan aspek-aspek yang berubah dan bertahan. Observasi mencakup kegiatan gotong-royong, rapat (rapat dinas dan rapat adat), jual beli di pasar, aktifitas upacara ke-agamaan, dan aktivitas sehari-hari lainnya.

Analisis diawali dengan membaca catatan lapangan (*field note*) dan hasil wawancara yang telah ditranskripsikan. Ini diikuti dengan mendeteksi tema-tema yang muncul dalam wawancara, yakni kasta dan perubahannya, sejarah dan adaptasi, upacara-upacara adat, pulau Bali versus Desa Kertoraharjo, interaksi sehari-hari. Setelah itu memberikan kode berdasarkan tema-tema tersebut.

Penelitian dimulai ketika memperoleh izin dari kepala desa dan kepala adat setempat. Nama-nama yang digunakan dalam artikel ini adalah nama samaran (*pseudonym*) untuk menjaga kerahasiaan identitas informan dan informasi yang diberikan (*confidential*).

Kasta: Pandangan Orang Bali Transmigran

Pemahaman kasta yang ada di Desa Kertoraharjo berasal dari Pulau Bali dan pada dasarnya serupa dengan konsep normatif kasta di Pulau Bali. Bagus (68 tahun), seorang pendeta di Desa Kertoraharjo memberikan gambaran tentang kasta yaitu:

Kasta dalam Hindu itu berarti tangga atau tingkatan. Tingkatan itu di bagi empat, Brahmana, Ksatria, Weisya dan Sudra. Tiap tingkat punya tanggung jawab berbeda-

beda. Brahmana sebagai pendeta, Ksatria sebagai pemimpin pemerintahan, Weisya sebagai usahawan dan Sudra sebagai petani dan pembantu. Menurut saya tujuannya sebenarnya untuk membuat keseimbangan kehidupan, masing-masing kasta saling melengkapi dan membutuhkan (Bagus, 68 tahun, Brahmana).

Agung, seorang pengukir, menjelaskan mengenai pembagian kasta dan fungsi masing-masing:

Kalau menurut umat Hindu, kasta itu diyakini terbagi satu Brahmana tugasnya menyucikan segala sesuatu yang ada di umat Hindu, kedua Ksatria tugasnya berperan di bidang politik, ketiga Weisya atau gusti namanya tugasnya itu berbisnis, terakhir Sudra tugasnya adalah membantu keempatnya ini (Agung, 60 tahun, Ksatria).

Tirta, seorang ibu rumah tangga, juga menjelaskan gambaran kasta sebagai berikut:

Dari apa yang pernah saya dapat, kasta atau *kaste* oleh orang Bali diartikan kedudukan seseorang. Kalau dari yang tertinggi itu Brahmana, kedua itu Ksatria, ketiga itu Weisya dan kemudian terakhir Sudra. Jadi setiap orang Bali punya kedudukannya masing-masing. Makanya setiap orang Bali itu punya cara-cara tersendiri dalam hidup, misalnya begini kalau Brahmana, begini kalau Sudra. Itu semua sudah ada dan jelas aturannya (Tirta, 62 tahun, Weisya).

Puspa, salah seorang pengajar Pendidikan Agama Hindu di Sekolah Menengah Atas, mengungkapkan, bahwa:

Secara pribadi yang saya tau, ini kan kasta ada empat dalam agama Hindu, ada kasta Brahmana, Ksatria, Weisya, dan Sudra. Kalau kasta itu yang saya tau kasta Brahmana ini semacam keturunan bangsawan, Ksatria itu pemimpin, Weisya itu bisa pedagang, kalau Sudra ya petani atau buruh (Puspa, 31 tahun, Sudra).

Uraian dari keempat kasta di atas memberikan gambaran mengenai pengertian kasta, pembagian kasta dan tugas masing-masing secara normatif. Surya (55 tahun) seorang pekerja bangunan, yang ahli dalam pembuatan pura dan rumah adat Bali,

menambahkan bahwa orang Bali di Desa Kertoraharjo memahami kasta sebagai mana orang Bali di Pulau Bali. Penggambaran Surya merupakan bentuk generalisasi pandangan mengenai pemahaman orang Bali tentang kasta di Desa Kertoraharjo, meskipun dalam realitasnya telah banyak perubahan yang terjadi.

Kasta: yang Berubah dan yang Bertahan

Meskipun pemahaman tentang kasta relatif serupa antara di Bali dan di Kertoraharjo, dalam prakteknya banyak mengalami perubahan. Apa yang berubah dan apa yang bertahan?

Kasta: Apa yang Berubah?

Perubahan dalam kaitan dengan interaksi antar kasta di Desa Kertoraharjo dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terkait dengan adaptasi orang Bali dengan lingkungan di daerah transmigran dan faktor eksternal terkait pengaruh kebudayaan suku-suku lain yang intensif berinteraksi dengan mereka.

Rasa senasib sebagai masyarakat transmigran menjadi penanda awal mulai meleburnya batasan kasta diantara sesama orang Bali di Kertoraharjo. Mereka beranggapan bahwa di Pulau Bali mereka berbeda satu sama lain berdasarkan kasta, tetapi di Kertoraharjo mereka 'serupa tapi tak sama'. Orang Bali di Kertoraharjo beranggapan bahwa jika perbedaan kasta seperti yang ada di Pulau Bali dijadikan acuan dasar dalam kehidupan awal di Desa Kertoraharjo, maka mereka percaya ini justru akan memecah-belah mereka, sehingga sulit untuk bekerjasama.

Kondisi lingkungan fisik di awal kedatangan mereka sebagai transmigran adalah hutan belantara yang harus diolah dan dijadikan sebagai lahan untuk tempat tinggal dan lahan pertanian yang merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian mereka kala itu. Dalam kondisi demikian, hal pertama yang dilakukan di lokasi transmigrasi adalah membuka lahan dengan menebang hutan dan membersihkan lahan untuk persiapan lahan pertanian, yang tidak dapat dilakukan secara individual, sehingga gotongroyong antar sesama transmigran sangat diperlukan, tidak peduli mereka berasal dari kasta apa.

Dalam konteks ini, kasta menjadi tak relevan untuk diteguhkan. Mereka yang berkasta Brahma yang berdasarkan norma berfungsi sebagai pendeta (memimpin setiap upacara-upacara adat) tidak dapat menjalankan fungsinya berdasarkan kasta karena keterbatasan sarana dan prasarana peribadatan. Kasta Ksatria dan Weisya pun demikian karena kondisi saat itu belum ada pemerintahan dinas (seperti desa dinas) dan perdagangan (seperti warung dan pasar). Sudra yang pada umumnya memang sebagai buruh dan petani dari tempat asalnya dapat dengan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan di Kertoraharjo karena ketrampilan mereka di bidang pertanian, ketekunan dan kemampuan bertahan hidup di tengah keterbatasan (*survival of the fittest*) sebagai mekanisme seleksi alam, dibandingkan dengan transmigran yang berkasta Triwangsa.

Kondisi ini menyebabkan kasta Sudra mampu berkembang dan membangun usaha-usaha lain dari kesuksesan bidang pertanian, seperti pabrik penggilingan padi, penyediaan alat-alat pertanian modern, dll. Kemampuan beradaptasi di lingkungan baru dan keberhasilan yang dicapai membuat mereka yang berasal dari kasta Triwangsa justru banyak yang kemudian bekerja pada mereka yang berkasta Sudra yang berhasil secara ekonomi. Selain itu, pada banyak kasus, justru kasta Triwangsa menjual lahan mereka sedikit demi sedikit bahkan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau memutuskan kembali ke Pulau Bali karena tidak mampu beradaptasi di daerah transmigrasi. Dalam konteks ini, 'siapa mengerjakan apa' menjadi tidak relevan dengan 'dari kasta mana seseorang berasal', demi untuk bertahan hidup di daerah transmigran.

Jumlah kasta Triwangsa yang minim, juga berpengaruh signifikan terhadap perubahan interaksi antar kasta di daerah transmigran. Made, seorang aparat desa, menggambarkan dominannya jumlah kasta Sudra dan perubahan dalam interaksi antar kasta di Pulau Bali, sebagai berikut:

Di Desa Kertoraharjo, jumlah mereka yang berkasta Triwangsa lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang berkasta Sudra.

Jumlah yang sedikit tidak mampu memberikan kekuatan dalam masyarakat. Berbeda dengan di Pulau Bali dimana jumlah mereka yang hanya 4 sampai 6 persen mampu menguasai bidang-bidang penting seperti politik, ekonomi, dan sosial (Made, 45 tahun, Sudra).

Secara historis, golongan Triwangsa telah menguasai bidang politik (pemerintahan adat, pemerintahan dinas dari daerah sampai pusat), ekonomi (kepemilikan tanah dan usaha yang luas) dan sosial (kedudukan sosial yang tinggi) karena ke-kasta-an mereka. Berbeda dengan di Desa Kertoraharjo, jumlah Triwangsa yang sedikit tidak mampu mengambil alih kekuasaan, sebagai-mana kasta Triwangsa di Pulau Bali (Dwipayana 2004:42-48, Wisnumuti 2012). Adaptasi kasta Sudra di daerah transmigrasi yang lebih mudah karena memiliki latar belakang sebagai petani membuat kasta Sudra mampu membuktikan kekuasaannya, paling tidak dalam bidang ekonomi. Di Kertoraharjo, bukan pemandangan tidak biasa bila seorang yang berkasta Sudra memiliki rumah berornamen yang menunjukkan identitas ke-Bali-annya, yang hanya dapat dibangun oleh mereka yang berkemampuan secara ekonomi (lihat **Gambar 1**).



Gambar 1. Rumah Berornamen Bali

Sementara, rumah papan yang dibangun sejak awal kedatangan di Kertoraharjo juga bukan pemandangan asing yang dijumpai dan dimiliki oleh orang Bali yang berkasta Triwangsa (lihat **Gambar 2**).



Gambar 2. Rumah Papan

'Pencairan' kasta yang cukup signifikan di daerah transmigran digambarkan oleh Arta, berikut ini:

Sekarang di Kertoraharjo sudah tidak ada itu kasta, semuanya sudah sama saja. Yang paling penting di Kertoraharjo siapa yang punya duit itu yang dihormati. Misalnya, saja lihat itu Ida Bagus justru bekerja jadi buruh di Pak Kembar yang berkasta Sudra.... Sekarang sudah terbalik siapa yang kaya itu yang jadi raja. Itulah yang dihormati bukan kasta. Cuma formalitas saja itu nama sekarang. Tetapi kalau di Bali ya masih kental.... Kalau di zaman dahuluan kalau Triwangsa seperti Anak Agung punya tanah banyak di Bali. Nah, penggarapnya itulah para Sudra atau budaknya. Berbeda disini justru terbalik (Arta, 65 tahun, pesiunan PNS, kasta Sudra).

Pandangan di atas menunjukkan bahwa status sosial berdasarkan kasta (*ascribed status*) tergantikan oleh status sosial berdasarkan 'siapa yang memiliki uang' (*achieved status*). Jika status sosial di Bali didasarkan pada *ascribed status* (diperoleh dari lahir), maka di Desa Kertoraharjo, status sosial didasarkan pada *achieved status* (diperoleh dengan usaha). Perubahan ini semakin nampak pada generasi kedua dan ketiga orang Bali di daerah transmigran. Dalam kaitan ini, Gusti—yang berkasta Ksatria—menjelaskan bagaimana area geografis berpengaruh signifikan terhadap 'pencairan' kasta pada orang Bali di daerah transmigran, sebagai berikut:

Kasta di Bali memang masih sangat kuat, berbeda disini. Sebabnya kalau di Bali masih ada banyak orang yang fanatik terhadap kasta. Mereka masih memegang teguh kasta, kalau Brahmana ya tetap Brahmana

dihormati, menjalankan fungsinya masing-masing. Kalau di sini sudah beda tempatnya. Soalnya semuanya sudah pakai istilah umum, semuanya sama (Gusti, 67 tahun, Ksatria).

Istilah umum yang dimaksud Gusti di atas adalah istilah yang merujuk pada penggunaan hal-hal yang tidak berciri budaya Bali (seperti penggunaan bahasa Indonesia, pemberian nama yang tidak merujuk pada kasta), yang tidak menunjukkan 'siapa berkasta apa'. Istilah ini populer digunakan di kalangan transmigran di Kertoraharjo.

Dari segi bahasa, Bahasa Bali terdiri dari tingkatan Bali Alus (halus), Bali Madya, Bali Kasar. Siapa menggunakan bahasa jenis yang mana didasarkan pada tingkatan kasta (Bawa 2002). Keseharian masyarakat di Kertoraharjo lebih banyak menggunakan bahasa Bali kasar. Hal ini karena kasta Sudra yang jumlahnya dominan dan menyebabkan bahasa Bali kasar menjadi bahasa yang mendominasi dalam interaksi baik antar sesama kasta maupun antar-kasta. Gusti membuat perbandingan dengan menceritakan kasus penggunaan bahasa antar-kasta yang dialaminya di Pulau Bali dengan konsekuensinya. Berikut ungkapannya:

Saya punya orang tua kan kastanya tinggi sama sebenarnya saya juga. Kalau di Bali saya harus pakai bahasa halus untuk bicara dan ketemu orang. Nah, saya punya keponakan itu kan masih sekolah dan teman sekolahnya sering jalan-jalan ke rumah. Temannya orang Sudra, terus saat bicara dengan keluarga saya tidak pakai bahasa halus, jadi langsung ditegur keras. Katanya, 'he kamu tidak boleh pake bahasa begitu sama kami' (Gusti, 67 tahun, Ksatria).

Sangsi teguran seperti yang diceritakan meski masih berlaku di Bali, ini tidak terjadi lagi di Kertoraharjo. Sepanjang penelitian ini berlangsung, saya menyaksikan hal serupa tapi tak sama dan tidak ada konsekuensi yang terjadi ketika mereka tidak menggunakan bahasa sesuai dengan norma kasta. Kebiasaan menggunakan bahasa Bali kasar di Desa Kertoraharjo menjadi hambatan tersendiri bagi Gusti saat kembali ke Pulau Bali karena harus menggunakan bahasa Bali Halus sesuai dengan status kastanya.

Sapaan terhadap seseorang juga berbeda berdasarkan kasta. Mereka yang berkasta Triwangsa disapa sesuai dengan gelar kasta mereka. Namun di Kertoraharjo, ini menjadi tidak relevan. Puspa, misalnya, mengungkapkan bahwa:

Di Kerto ini sudah memudar, sapaan yang digunakan saja sudah sangat berbeda. Misalnya saja, kepada yang berkasta lebih tinggi memanggilnya dengan sapaan *ci..ci..ci..* (kamu... kamu...kamu..) padahal dahulu harus lengkap seperti Dewa, Desak, Ida Bagus, Ayu dan lain-lain (Puspa, 31 tahun, Sudra).

Penggunaan sapaan *ci* (kamu) merupakan sapaan paling kasar bagi orang Bali, dan hanya lazim digunakan dalam menyapa sesama kasta Sudra saja. Namun Puspa menambahkan bahwa jika menyapa dengan menggunakan gelar, sapaan menjadi kaku dan menimbulkan batasan di antara mereka. Ini karena sapaan dengan penggunaan gelar secara otomatis mengindikasikan kasta.

Iluh, pedagang yang berkasta Ksatria, menjelaskan kondisi penggunaan bahasa dalam kegiatan jual-beli di pasar:

Kalau di pasar ya biasa pakai bahasa Indonesia. Tetapi kalau sesama Bali pakai bahasa Bali biasa yang kasar, bukan Bahasa Halus. Kalau ketemu sama Gusti atau Agung ya saya sapa dan tanya pakai bahasa halus. Tapi biasa malah dibalas pakai Bahasa Indonesia. Jadi umumnya banyak yang pilih pakai Bahasa Indonesia saja (Iluh, 52 tahun, kasta Ksatria).

Iluh mencoba menggambarkan bahwa masyarakat Bali di Kertoraharjo menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa alternatif. Bagi mereka yang berkasta Triwangsa, ketimbang berkomunikasi dengan Bahasa Bali Kasar yang tidak sesuai dengan kastanya, lebih baik menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tak menunjukkan kasta. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di Pulau Bali dimana sesama orang Bali akan berbicara menggunakan bahasa sesuai dengan kasta. Ketika berbicara dengan orang non-Bali, mereka menggunakan ‘bahasa pasaran’—bahasa yang sehari-hari digunakan—yakni Bahasa Indonesia.

Ketika mengunjungi Kantor Desa Kertoraharjo, saya menyaksikan bagaimana kasta menjadi tidak relevan, ketika salah seorang kepala bidang yang berkasta Sudra memerintahkan salah seorang bawahannya yang berkasta Ksatria untuk mengumpulkan data dengan Bahasa Bali kasar. Ini tak menimbulkan persoalan karena di kantor tersebut yang berkasta Sudra adalah atasan dari pegawai yang berkasta Ksatria. Ketika saya mengonfirmasikan hal tersebut pada Pak Made (45 tahun) yang juga seorang pegawai pemerintahan, ia menanggapi bahwa ‘hal semacam itu sah-sah saja, masyarakat yang berkasta tinggipun kalau datang ke kantor desa sudah tidak menggunakan Bahasa Bali Halus sesuai norma kasta, melainkan memadukannya dengan Bahasa Indonesia’.

Ini karena kemampuan Bahasa Halus mereka yang kurang dan takut terjadi kesalahan atau ketersinggungan, sehingga penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tak berkasta. Hal ini tidak saja memudahkan mereka berinteraksi antar-kasta (dan dengan etnik-etnik lain), tapi juga menghilangkan sekat-sekat kasta di antara mereka.

Desa Kertoraharjo memiliki fasilitas sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK)/ Play Group, SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA Negeri. Interaksi kasta di sekolah diungkapkan Puspa (31 tahun, pengajar SMA), bahwa di lingkup sekolah akan sulit untuk berinteraksi berdasarkan kasta karena eksistensi berbagai etnis (seperti Jawa, Toraja, Bugis), sehingga meskipun di antara mereka ada orang Bali, norma kasta menjadi tidak relevan. Misalnya, ketika seorang siswa berkasta Sudra menyapa siswa yang ber-kasta Brahmana dengan sapaan: ‘*Hai telaso, ngae apo kamu ditu?*’ (Hai penis, sedang bikin apa kamu disitu?).

Ungkapan ini tidak hanya bermakna kasar, tetapi juga seronok (khususnya di Sulawesi Selatan). Reaksi yang ditimbulkan siswa Brahmana bukanlah marah karena merasa dihina, justru ia membalas dengan gurauan: ‘*Nongkrong ne bro*’ (lagi nongkrong ya). Saat ditanyakan kepada siswa berkasta Brahmana tentang hal tersebut, ia menjelaskan bahwa itu ‘sapaan perteman’ yang umum dilakukan di antara

mereka. Namun, Desak (16 tahun), seorang siswa SMA berkasta Brahmana mengungkapkan, bahwa:

Memang orang tua selalu bilang kalau saya itu berasal dari golongan atas. Saya disuruh jaga sikap jangan seperti orang bawahan yang tidak punya sopan santun. Orang tua juga biasa bilang jangan berbicara dengan orang bawah saat berkelahi nanti kamu jadi orang bawah (Desak, 16 tahun, kasta Brahmana).

Ungkapan Desak menunjukkan bagaimana orang tuanya menanamkan pentingnya etika dalam berinteraksi yang sekaligus menunjukkan strata sosial yang bersangkutan, sehingga di manapun mereka berdomisili (di Bali atau di Kertoraharjo), etika harus disesuaikan dengan status sosial mereka. Jika menilik kastanya, maka kita dapat berasumsi bahwa orang tua Desak mengajarkan anaknya demikian karena mereka berasal dari kasta Brahmana. Namun bagi Puspa yang berkasta Sudra, etika berinteraksi antar-kasta tetap merupakan sesuatu yang penting, sehingga sebagai guru ia tetap menerapkannya. Meskipun ia menggunakan bahasa Indonesia dalam pemanggilan terhadap siswa/siswi yang berkasta lebih tinggi darinya ia tetap menggunakan panggilan yang sesuai dengan kasta mereka (seperti Dewa, Ida Bagus). Dalam konteks ini, sebagai guru ia ingin tetap menunjukkan respek terhadap siswa yang berkasta lebih tinggi.

Perubahan interaksi antar-kasta di sekolah terbentuk karena interaksi dengan non-Bali (seperti Jawa, Bugis, Lombok, Toraja, Pammona). Desak mengungkapkan bahwa ia dan teman seangkatan-nya umumnya tidak dibekali pengetahuan tentang kasta oleh orang tua mereka. Lingkungan sosial di luar sekolah (tetangga) juga kurang memahami sistem kasta.

Di Desa Kertoraharjo, para petani tergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), yang diketuai oleh seorang yang berkasta Sudra. Salah satu anggota Kelompok Tani Gapoktan adalah Kelompok Tani Ukir Sari. Dalam struktur organisasinya, misalnya, pengurus Kelompok Tani Ukir Sari didominasi oleh kasta Sudra (lihat

Gambar 3), dan pemilihan pengurus dilakukan melalui musyawarah.

Gambar 3. Susunan Organisasi Sanggar Tani Ukir Sari

Dalam kaitan dengan ini, Widana—salah satu pengurus pusat Gapoktan—menjelaskan bahwa:

Pengurus pada kelompok tani dipilih dari hasil musyawarah bukan berdasarkan kasta mereka, melainkan dipilih secara profesional. Walaupun kasta tinggi, tapi kalau tidak paham mengenai pertanian juga rugi dipilih. Zaman sekarang harus menentukan pemimpin berdasarkan kemampuannya, bukan kasta (Widana, 45 tahun, kasta Sudra).

Berberapa kelompok tani lainnya menunjukkan kesamaan dalam kepengurusan inti mereka. Ini menunjukkan bahwa kepengurusan kelompok tani tidak didasarkan pada kasta, tapi berdasarkan profesionalitas dan kemampuan mereka dalam bidang pertanian. Mereka menjunjung tinggi ke-bersamaan dan persatuan kelompok di atas kepentingan yang lain (termasuk kasta) sebagai 'kunci utama' dalam mencapai tujuan.

Merta (43 tahun), salah seorang pemilik penggilingan padi, traktor dan perontok padi (*dros*) menegaskan bahwa dalam kegiatan sehari-hari mereka saling berinteraksi selayaknya masyarakat umum lainnya, tidak ada kasta yang menjadi batasan-batasan mereka. Hubungan antara bos dan anggotanya sebagaimana layaknya hubungan antar atasan dan bawahan, tak peduli 'siapa berkasta apa'. Sudra yang menduduki posisi sebagai bos (pemilik) disebut 'Sudra Kaya'. Sudra Kaya selalu beranggapan bahwa kasta hanya berlaku di Pulau Bali saja. Kapal (57 tahun), pemilik penggilingan padi, mengatakan bahwa kalau dalam keseharian ia dan anggota-anggotanya yang berkasta



Triwangsa tidak menggunakan bahasa Bali halus sesuai aturan kasta, melainkan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa: ‘Bos tidak mungkin bicara halus sama bawahan, pakai nunduk sambil bilang *inggi*, justru bawahan yang harus tunduk sama Bos’. Pekerja yang berkasta Triwangsapun tidak merasa keberatan dengan sikap bos terhadap mereka tanpa aturan kasta. Mereka bahkan bersyukur karena telah dipekerjakan. Ini mengindikasikan bagaimana norma berdasarkan kasta ‘ditolerir’ karena kepentingan ekonomi mereka, dan Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dianggap sebagai ‘pencair’ kekakuan komunikasi antar bos dan bawahan.

Di Kertoraharjo terdapat pasar tradisional, masyarakat menyebutnya Pasar Kerto, yang dibuka setiap dua kali seminggu (Senin dan Jumat), antara jam 06.00 dan jam 11.00. Pasar ini menjadi satu-satunya pusat aktivitas ekonomi desa dalam pemenuhan kebutuhan hidup ataupun kebutuhan ritual orang Bali di Kertoraharjo. Kios-kios penjual barang keperluan ritual, seperti bahan sesaji dan pernak-pernik ritual sangat mudah dijumpai dan menjadi pusat kerumunan orang Bali (lihat **Gambar 4**).



Gambar 4. Aktivitas Kios Penjual Bahan Sesaji

Di pasar, orang Bali lebih banyak menggunakan Bahasa Bali Kasar (terutama di kios-kios yang pemiliknya orang Bali) atau Bahasa Indonesia dalam berinteraksi. Meskipun penggunaan Bahasa Indonesia sangat dominan, Bahasa Bali Kasar juga digunakan. Misalnya, ketika seorang penjual berkasta Weisya bertransaksi dengan pembeli berkasta Sudra. Si pembeli berkata: ‘*Kudo ne buk jaje uli ne?* (Berapa ini bu harga kue ulinya?)’. Penyapaan seperti ini menunjukkan bahwa bahasa Bali kasar yang secara normatif tidak pantas digunakan

oleh orang yang berkasta Sudra terhadap orang yang berkasta di atasnya dan mengindikasikan ketidak-signifikanan kasta dalam bertransaksi di pasar.

Aktivitas di Pasar Kertoraharjo, salah satu tempat berinteraksi yang digunakan tidak hanya antar orang Bali, tapi juga dengan suku lain, seperti Jawa, Lombok, Bugis, Toraja dan lainnya, yang membuat interaksi yang terbangun semakin kompleks. Interaksi antar-sesama orang Bali hanya banyak terjadi di kios-kios milik orang Bali saja dimana Bahasa Bali Kasar digunakan. Namun, Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dominan digunakan antar-sesama orang Bali dan dengan suku lain diberbagai tempat.

Berbagai perubahan yang terjadi merupakan hasil reproduksi dalam proses interaksi mereka seiring dengan perkembangan masyarakat di lokasi transmigrasi. Namun, ‘ini kan bukan Bali’ menjadi frasa yang melegitimasi pengabaian norma berdasarkan kasta. Apakah semua norma berdasarkan kasta berubah? Atau ada norma yang masih bertahan?

Kasta: Apa yang Bertahan?

Selain perubahan-perubahan terkait kasta yang terjadi di Desa Kertoraharjo, ada norma berkasta yang masih bertahan, yakni interaksi dalam ritual-ritual adat, dimana orang ditempatkan pada posisi atau kedudukan berdasarkan kasta.

Bagus, salah seorang pendeta di Kertoraharjo, menggambarkan kondisi interaksi yang terjadi di lingkungan pura dan banjar, bahwa ‘[prilaku] keseharian masyarakat Bali [di Kertoraharjo] berbeda dengan saat kalau di pura, banjar, atau rumah pendeta. Bahasa halus dan sikap sopan harus dijaga. Secara adat mereka lebih rendah dari pada kami’ (Bagus, 67 tahun, Brahmana).

Ngurah, seorang petani, juga mengungkapkan hal serupa: ‘Kita bertamu misalnya ke rumah Brahmana, maka kita harus tunduk dan hormat sama mereka. Kalau bisa, Bahasa Bali Halus harus dipakai. Biar di pura juga begitu kalau berbicara kita masih pakai bahasa halus (Ngurah, 34 tahun, Weisya).

Bagus dan Ngurah menekankan bahwa norma berkasta tetap berlaku pada konteks ritual. Kenapa demikian? Ini karena mereka takut akan karma dan hilangnya kepercayaan yang dianut sebagai ummat Hindu. Melanggar norma berkasta ibarat menentang Tuhan, dan akan mendapatkan karma.

Pada kegiatan upacara adat seperti *purname* (sembahyang pada malam bulan purnama) masih jelas menunjukkan bagaimana kasta berperan sangat signifikan. Brahmana sebagai pemimpin upacara atau pengatur sesaji, sementara kasta lain menjadi anggota selama berlangsungnya upacara tersebut. Bahasa pengantar ibadah juga menggunakan Bahasa Bali Halus. Bagi remaja/pemuda yang tidak mumpuni berbahasa Bali Halus, mereka memilih diam ketika berada dalam pura untuk menghindari komunikasi dengan Brahmana (pendeta). Jika dalam kondisi yang sangat mendesak, untuk merespon percakapan yang berlangsung mereka 'bermain cantik' (*play safe*), yakni sekedar mengiyakan apa yang dikatakan dengan menggunakan kata *enggih* (yang berarti iya secara halus).

Pada ritual lain, seperti upacara kematian (*ngaben*), kekentalan pemberlakuan norma berkasta sangat signifikan. Dalam kaitan dengan ini, Ngurah mengungkapkan bahwa:

Di Bali jika seorang Brahmana, Ksatria, atau Weisya meninggal dunia, maka ritual *ngaben* dapat langsung segera dilakukan karena mampu secara ekonomi. Sementara bagi mereka yang berkasta Sudra, biasanya dikubur terlebih. Setelah itu keluarga-keluarga Sudra bersatu secara kelompok untuk melakukan acara *ngaben* bersama (kolektif). Ini karena kondisi ekonomi Sudra yang rendah menjadikan mereka saling berkumpul dan membantu agar lebih ringan biayanya (Ngurah, 34 tahun, Weisya)

Di Desa Kertoraharjo sendiri ritual *ngaben* seperti yang dijelaskan Ngurah masih serupa dan dilakukan sampai sekarang. Setiap yang meninggal dapat mengadakan *ngaben* jika dianggap mampu secara ekonomi, tidak harus menunggu *ngaben* massal. 'Sudra Kaya' dapat melakukan *ngaben* secara langsung tanpa menunggu *ngaben* massal karena memiliki kemampuan untuk melaksanakan *ngaben* secara langsung,

meskipun peralatan-peralatan yang tercakup dalam ritual tersebut berbeda dengan mereka yang berasal dari kasta Triwangsa. Ini dapat dilihat dari detail upacara, seperti penutup mayat (*kajang*), dan wadah mayat (*petulangan*). Meski bentuk dan ukurannya serupa, tulisan atau ukiran yang berisi pesan-pesan keluarga yang ditinggalkan kepada yang meninggal, fungsinya dimaksudkan mem-percepat perjalanan ke alam selanjutnya. Benda-benda yang dianggap sebagai 'simbol pelepasan' tersebut menunjukkan perbedaan antar kasta.

Namun, ritual *ngaben* di Bali kemudian diatur melalui Perda (*awig-awig*¹) No. 3/2003, dimana mayat terlebih dahulu dikuburkan dan setelah 3 sampai 5 tahun, kuburan digali kembali dan bagian tubuh yang tersisa diambil untuk *diaben* secara massal (baca Winda 2008). Dengan cara demikian, menurut Kutanegara (*personal interview*, 21 Mei 2016), ritual tetap dilaksanakan, tapi biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis dibandingkan jika diupacarakan sendiri-sendiri. Dalam konteks ini kasta, dari yang meninggal menjadi tidak relevan karena dari kasta manapun, mereka dikumpulkan untuk *diabenkan* bersama.

Idealnya perkawinan menurut kasta adalah perkawinan antar sesama kasta (endogami). Ini dimaksudkan untuk tetap menjaga ke-kasta-an mereka. Saat ini, perkawinan beda kasta telah banyak terjadi di pulau Bali (eksogami). Perkawinan ini dapat meliputi laki-laki Triwangsa dengan perempuan Sudra atau laki-laki Sudra dengan perempuan Triwangsa (Budiana, 2009). Keeksogamian ini bukan berdasarkan perbedaan etnik, tapi berdasarkan perbedaan kasta.

Di Desa Kertoraharjo perkawinan berbeda kasta juga banyak terjadi, tapi hal ini tidak menjadi persoalan, sehingga *ngrorod*—kawin lari karena perbedaan kasta—juga menjadi tidak relevan. Pemberian nama kepada anak berdasarkan kasta hasil perkawinan antara sesama kasta Triwangsa masih signifikan di Desa Kertoraharjo sesuai dengan kastanya. Namun, dalam pemberian nama kepada anak dari hasil perkawinan

¹ *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh desa (adat) sebagai pedoman pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai desa (adat) atau banjar masing-masing.

beda kasta, nama anak akan mengikuti kasta bapaknya, karena etnik Bali menggunakan sistem perkawinan patrilineal, dengan garis keturunan diperhitungkan melalui pihak laki-laki. Namun demikian, di Kertoraharjo, pada banyak kasus, gelar yang menunjukkan identitas berkasta tidak digunakan karena kesulitan memilih antara menggunakan gelar kasta Triwangsa atau Sudra.

Bagi 'sudra kaya', nama berdasarkan kasta dihindari dan menggunakan nama-nama non-Bali, seperti Agus Apnawirawan, Yogi Santoso, Hadi Darsana, Ayu Ratna Ningsih. Mereka mencoba menghilangkan identitas kasta (sebagai Sudra) karena status capaian mereka (*achievement status*) yang tinggi. Selain itu, mereka menganggap bahwa gelar berkasta tidak relevan lagi di daerah transmigrasi. Selain itu, keengganan di kalangan 'sudra kaya' untuk menggunakan nama-nama dan gelar tradisional dan menggantikannya dengan nama-nama modern, untuk menunjukkan kekinian mereka.

Kesimpulan

Berbeda dengan status sosial di Bali yang didasarkan pada sistem kasta (*ascribed status*), maka status sosial di Kertoraharjo berkaitan dengan capaian (*achieved status*), dan ini diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan orang Bali di Kertoraharjo. Kemampuan beradaptasi mereka yang berkasta Sudra dengan kondisi lokal yang serba terbatas (*survival of the fittest*) karena keandalan mereka dalam bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama di Kertoraharjo. Dengan demikian, mereka relatif lebih berhasil dan sejahtera dibandingkan dengan mereka yang berkasta Triwangsa. Ini membuat orang Bali yang berkasta Triwangsa di Kertoraharjo menolerir berbagai perubahan dalam kaitan dengan norma berkasta.

Penggunaan kasta dalam kehidupan orang Bali di Kertoraharjo menunjukkan bahwa beda arena, beda perilaku tergantung dimana interaksi berlangsung. Dalam arena yang berkaitan dengan hubungan antar manusia (hubungan horizontal), seperti dalam kelompok tani,

sekolah, dan pasar, kasta menjadi kurang relevan; sementara di arena yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan (hubungan vertikal), seperti di pura, *banjar*, dan rumah pendeta, pengejawantahan kasta menjadi sangat signifikan karena dipercaya bahwa melanggar norma berkasta dalam kaitan dengan hubungan dengan Sang Hyang Widhi dapat menimbulkan karma.

Perubahan bahasa (dari Bahasa Bali Halus ke Bahasa Bali Kasar, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa tak berkasta), perubahan cara berkomunikasi serta perilaku (penghormatan didasarkan pada capaian dalam kehidupan ketimbang), perubahan pemberian nama berkasta pada 'Sudra Kaya' adalah aspek-aspek yang menunjukkan perubahan dalam interaksi antar kasta di Kertoraharjo. Perubahan ini menunjukkan melemahnya identitas ke-Bali-an dan menguatnya identitas baru, yakni Bali transmigrasi, dan bahkan lebih jauh dapat dimaknai sebagai menguatnya rasa ke-Indonesiaan dibandingkan ke-Bali-an.

Ungkapan 'Ini kan Bukan Bali' menjadi salah satu bentuk ekspresi proses transformasi ideologis, berfikir dan cara pandang transmigran Bali terhadap konteks dimana mereka berada (bukan di Bali), terutama terkait dengan interaksi antar kasta dan perkastaan. Kertoraharjo merupakan salah satu contoh proses transformasi budaya masyarakat yang berpindah dan bahkan tercerabut dari akarnya sebagai implikasi dari proses diaspora.

Daftar Pustaka

- Atmadja, Nengah Bawa. 2010. *Ajek Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS.
- Bagus, IGN. 1980. *Ideas of Identity the Interpretation of Kinship in Bali*. Denpasar: Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Bawa, I W. 2002. *Sejarah Perkembangan Bahasa Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Budiana, I Nyoman. 2008. *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat Bali*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Creswell, Jhon W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwipayana, AA GN Ari. 2004. *Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*. London and Boulder, Colorado: Pluto Press.
- _____. 2009. *Antropologi Sosial dan Budaya Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: CV. Titian Galang Printika.
- Geertz, C. 1984. 'Tihingan: Sebuah Desa di Bali' dalam Koentjaraningrat (peny.) *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 246-275.
- Karepun, Made Kembar. 2007. *Mengurai Benang Kusut Kasta*. Denpasar: PT. Empat Warna Komunikasi.
- Nehen, Ketut dan Ketut Sudhana Astika, Nyoman Naya Sujana, I.B. Yudha Triguna, I Gde Pitana, Ketut Ardhana. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan*. Denpasar: BP.
- Tinggen, I Nengah. 1986. *Sor Singgih Basa Bali*. Singaraja: Percetakan Eka Cipta.
- Winda, Wayan P. 2008. *Bali Mawacara: Kesatuan Awig-awig, Hukum dan Pemerintahan di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka. 2012. *Relasi Kuasa –Penguatan Demokrasi Lokal di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.